

# **Peran Penataan Ruang dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Indonesia**

Pidato Sambutan

Dirjen Penataan Ruang - Departemen Pekerjaan Umum

Pada acara :

“Penyampaian Penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang”

Semarang, 2 Mei 2006

- 
- Yth. Bpk. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
  - Yth. Bpk. Walikota Semarang beserta jajarannya
  - Para hadirin sekalian.

**Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.**

Pertama-tama seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya atas nama Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Semarang, yang pada hari ini, tanggal 2 Mei 2006, merayakan Hari Jadi Kota Semarang yang ke 412. Tentunya banyak dinamika sosial ekonomi yang telah terjadi dalam kurun waktu tersebut, yang tentunya telah mewarnai kebijakan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menata kotanya.

Penataan kota dalam rangka untuk mewujudkan permukiman kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, tentunya tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah prasyarat utama bagi penyelenggaraan pembangunan kota, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi acuan dasar didalam penyelenggaraan pembangunan setiap sektor pengisi ruang kota tersebut.

Departemen Pekerjaan Umum, telah bertekad untuk menjadikan Tata Ruang sebagai dasar bagi pengembangan kota yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Telah

banyak upaya yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan dari tekad tersebut antara lain penyusunan NSPM, pemberian bantuan teknis, pemberian pembinaan teknis, dan bahkan di tahun 2005 yang lalu, dalam rangka untuk mendorong kota-kota untuk meningkatkan penataan kotanya, Departemen Pekerjaan Umum telah menyelenggarakan penilaian kinerja kota dalam penyelenggaraan pekerjaan umum termasuk bidang Penataan Ruang. Dari hasil penilaian tersebut Kota Semarang telah terpilih di peringkat kedua. Prestasi tersebut tentunya tidak diperoleh dengan mudah, melainkan sudah melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam tahap perencanaan, masyarakat luas turut dilibatkan, dalam tahap pemanfaatan ruang, perijinan telah betul-betul dilaksanakan, dan dalam tahap pengendalian pemanfaatan ruang sanksi telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

Kami atas nama Menteri Pekerjaan Umum mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai tersebut, dan semoga penyelenggaraan penataan ruang di kota Semarang ini dapat semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dalam rangka untuk mewujudkan Kota Semarang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

**Bapak, Ibu, Saudara-saudara para hadirin sekalian,**

Kawasan perkotaan di Indonesia dewasa ini cenderung mengalami permasalahan yang tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan kependudukan. Permasalahan lainnya berkaitan dengan tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan, terutama lahan-lahan yang seharusnya dilindungi agar tetap hijau menjadi daerah terbangun, yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas lingkungan perkotaan. Lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang juga merupakan masalah seperti misalnya munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai dan timbulnya kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu.

Data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Pada 1980 jumlah penduduk perkotaan baru mencapai 32,8 juta jiwa atau 22,3 persen dari total penduduk nasional. Pada tahun 1990 angka tersebut meningkat menjadi 55,4 juta jiwa atau 30,9 persen, dan menjadi 90 juta jiwa atau 44 persen pada tahun 2002. Angka tersebut diperkirakan akan mencapai 150 juta atau 60 persen dari total penduduk nasional pada tahun 2015.

Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan.

Kualitas dan kuantitas ruang terbuka publik, terutama ruang terbuka hijau (RTH) pada 30 tahun terakhir, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970an menjadi kurang dari 10% pada saat ini. Hal ini telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya tingkat polusi udara, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.

### **Hadirin yang terhormat,**

Perencanaan tata ruang wilayah perkotaan berperan sangat penting dalam pembentukan ruang-ruang public terutama RTH di perkotaan. Perencanaan tata ruang perkotaan seyogyanya dimulai dengan mengidentifikasi kawasan-kawasan yang secara alami harus diselamatkan (kawasan lindung) untuk menjamin kelestarian lingkungan, dan kawasan-kawasan yang secara alami rentan terhadap bencana alam (*prone to natural hazards*) seperti gempa, longsor, banjir maupun bencana alam lainnya. Kawasan-kawasan inilah yang harus kita kembangkan sebagai ruang terbuka (*open spaces*), baik hijau maupun non-hijau.

Selanjutnya rencana tata ruang perkotaan juga harus secara ekologis dan planologis memasukkan komponen-komponen RTH maupun ruang terbuka publik lainnya dalam struktur tata ruang kota. Secara hirarkis, struktur pelayanan kota harus dapat mengakomodasi ruang terbuka publik dalam perencanaan tata ruang perkotaan pada setiap tingkatannya. Dari mulai lingkungan yang terkecil (RT/RW), kelurahan, kecamatan hingga tingkat metropolitan, unsur RTH yang relevan harus dapat disediakan.

### **Saudara-saudara sekalian,**

Issue yang kita hadapi berkaitan dengan ruang terbuka publik atau ruang terbuka hijau secara umum terkait dengan beberapa permasalahan perkotaan, seperti menurunnya **kualitas lingkungan hidup**, yang dapat membawa dampak perubahan **perilaku sosial masyarakat** yang cenderung kontra-produktif dan destruktif, serta timbulnya bencana banjir dan longsor.

Dari **aspek kondisi lingkungan hidup**, rendahnya kualitas air tanah, tingginya polusi udara dan kebisingan di perkotaan, merupakan hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan keberadaan RTH secara ekologis. Kondisi tersebut secara ekonomis juga dapat menurunkan tingkat produktivitas, dan menurunkan tingkat kesehatan serta tingkat harapan hidup masyarakat, bahkan menyebabkan kelainan genetik dan menurunkan tingkat kecerdasan anak-anak pada generasi mendatang akibat *exposure* terhadap polusi udara yang berlebihan. Selain itu dari **aspek perilaku sosial**, tingginya tingkat kriminalitas dan konflik horizontal di antara kelompok masyarakat perkotaan secara tidak langsung juga disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang kota yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial dan pelepas ketegangan (*stress releaser*) yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Di samping itu tingginya frekuensi bencana banjir dan tanah longsor di perkotaan dewasa ini juga diakibatkan karena terganggunya sistem tata air karena terbatasnya daerah resapan air dan tingginya volume air permukaan (*run-off*).

Sementara itu secara teknis, issue yang menyangkut penyelenggaraan RTH di perkotaan antara lain menyangkut **kurangnya optimalisasi** penyediaan RTH baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lemahnya **kelembagaan dan SDM**, kurangnya

**keterlibatan *stakeholder*** dalam penyelenggaraan RTH, serta **terbatasnya ruang/ lahan** di perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH.

**Kurangnya optimalisasi** ketersediaan RTH terkait dengan kenyataan kurang memadainya proporsi wilayah yang dialokasikan untuk ruang terbuka, maupun rendahnya rasio jumlah ruang terbuka per kapita yang tersedia. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya lokal (artefak alami dan nilai sejarah).

Secara **kelembagaan**, masalah RTH juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan RTH sehingga keberadaan RTH masih bersifat marjinal. Di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat mengelola RTH secara lebih profesional. Di sisi lain, **keterlibatan swasta** dan masyarakat masih sangat rendah dalam penyelenggaraan RTH, sehingga pemerintah selalu terbentur pada masalah keterbatasan pendanaan.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan dalam rangka untuk mengurangi beban perkotaan adalah dengan mengembangkan daerah perdesaan agar arus urbanisasi ke perkotaan dapat diturunkan seperti misalnya dengan mengembangkan kawasan agropolitan. Dengan pengembangan kawasan agropolitan, di desa dikembangkan sarana produksi untuk mengolah bahan baku yang dihasilkan di desa tersebut, sehingga di desa tersebut akan terjadi nilai tambah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Selain melalui pengembangan sarana produksi, juga dikembangkan sarana dan sarana pendukung lainnya, sehingga kawasan perdesaan tersebut akan menjadi kawasan perkotaan yang bernuansa pertanian.

Selain itu untuk mendukung kota yang sudah berkembang menjadi sangat besar (metropolitan) yang notabene mempunyai berbagai permasalahan yang sangat kompleks perlu dikembangkan kota-kota satelit disekitarnya dengan mengemban fungsi-fungsi tertentu dan juga dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai sehingga mampu menarik sebagian penduduk yang semula berorientasi ke kota inti sehingga beban kota inti menjadi berkurang.

## **Hadirin sekalian,**

Sebagai bahan perbandingan dan contoh empiris tentang bagaimana penataan ruang kota dapat diselenggarakan secara terpadu lintas wilayah, lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan, kita bisa melihat cerita sukses Curitiba di Brazil yang dalam 30 tahun terakhir berkembang dari kota kumuh menjadi kota yang paling diminati.

Curitiba merupakan kota yang penduduknya tumbuh sangat pesat dari 150.000 jiwa pada tahun 1950-an menjadi kota dengan 1,6 juta jiwa pada saat ini. Tidak ubahnya seperti kota-kota lain di Amerika Latin, pada awal 1970-an Curitiba mengalami banyak masalah tipikal seperti permukiman kumuh, kemacetan lalu lintas yang sangat buruk, pedagang kaki lima di segala penjuru, penduduk miskin dengan literasi kurang dari 50%, ruang kota yang terlalu padat, banjir dan ruang terbuka yang sangat terbatas (hanya 1 m<sup>2</sup> per kapita).

Pada 1971 Jaime Lerner, seorang arsitek yang terpilih menjadi walikota Curitiba, mencoba melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penataan kembali dan reorientasi kota. Beberapa hal utama yang dilakukan antara lain adalah:

- **Mendorong pembangunan dengan kepadatan tinggi** di sepanjang lima jalur **arteri** utama yang menyebar secara radial dari pusat kota ke arah luar. Dengan demikian pusat perdagangan yang ada tersebar ke segala arah dan beban lalu lintas di pusat kota menjadi lebih ringan
- **Membangun jaringan transportasi umum** dari pinggiran kota ke arah pusat dan jalur-jalur sirkuler yang mengelilingi kota, dengan sistem busway yang memiliki frekuensi operasi dan daya angkut yang tinggi.
- **Meningkatkan penghijauan kota** dengan membagikan 1,5 juta bibit tanaman kepada para penduduk di seluruh kawasan permukiman untuk ditanam dan dipelihara.

Saat ini Curitiba telah berkembang menjadi kota yang nyaman dengan 17 taman-taman baru, dimana tingkat ruang terbuka hijaunya meningkat dari 1m<sup>2</sup> menjadi 55 m<sup>2</sup> per kapita, yang merupakan angka yang sangat tinggi untuk suatu kota. Tingkat pendapatan penduduknya pun saat ini telah menyamai pendapatan rata-rata penduduk Brazil.

**Bapak, Ibu, Saudara-saudara para hadirin sekalian,**

Demikian yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mengucapkan selamat atas Hari Jadi Kota Semarang yang ke 412 ini, dan juga atas prestasi yang telah dicapai Kota Semarang mendapat peringkat kedua penghargaan Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang, dan semoga penyelenggaraan pembangunan Kota Semarang kedepan dapat semakin ditingkatkan dalam rangka untuk menjadi kota semarang menjadi kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Semarang, 2 Mei 2006

**Direktur Jenderal Penataan Ruang  
Departemen Pekerjaan Umum**

**Dr. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc.**